

RENCANA STRATEGIS

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN KARANTINA PERTANIAN

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG

JL. Sutan Syahrir No. 267 Mata Air - PADANG

Telp/Fax : (0751) 62560 ; 819136

Email : bkp_ks1_padang@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN

Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Padang merupakan UPT Badan Karantina Pertanian dengan wilayah kerjanya meliputi Pelabuhan laut Teluk Bayur, Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kantor Pos Padang, Pelabuhan Bungus dan tempat-tempat pemasukan/pengeluaran di Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok sebagai filter dari masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) / Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari luar negeri dan mencegah tersebarnya dari daerah tertular ke daerah bebas yang berarti pula melindungi dan melestarikan kekayaan alam hayati nabati dan hewani serta melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar.

II. TUJUAN

Sebagai salah satu acuan dalam evaluasi, perencanaan, pengembangan organisasi, personil, pelaksanaan kegiatan operasional serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada tahun berikutnya.

III. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) :

➤ Karakteristik UPT

Dalam rangka memenuhi target dan sasaran Pembangunan Pertanian nasional dan daerah sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategik Departemen Pertanian tahun 2015 - 2019 dan pembangunan pertanian Provinsi Sumatera Barat dengan salah satu fokusnya adalah Peningkatan Ketahanan Pangan, penyelenggaraan karantina pertanian dilaksanakan dengan upaya menciptakan kondisi agribisnis yang kompetitif dipasar global dan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman OPTK / HPHK serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki dengan jalan melakukan pengawasan yang efektif di pintu-pintu pemasukkan dan pengeluaran (Pelabuhan, Bandara, Kantor Pos, Lintas Batas) untuk mengantisipasi makin meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas perdagangan produk pertanian.

Penyelenggaraan karantina pertanian di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dalam rangka merespon isu-isu publik yang berkaitan dengan ketahanan pangan yaitu :

1. Adanya gangguan OPTK / HPHK terhadap kesinambungan ketahanan pangan dan usaha tani ;
2. Menurunnya produksi dan produktifitas serta daya saing komoditas pertanian akibat gangguan OPTK / HPHK ;
3. Ancaman kelestarian sumber daya hayati nabati dan hewani ;
4. Adanya penolakan komoditas pertanian yang diekspor di beberapa negara tujuan ;
dan
5. Ancaman masuknya komoditas pertanian impor yang tidak sehat, aman, utuh dan halal ke wilayah negara Republik Indonesia ;

Era globalisasi telah membawa perubahan yang mendasar pada sistem perdagangan dunia, penerapan dan penggunaan berbagai bentuk subsidi, tarif dan ketentuan-ketentuan tata niaga yang dianggap sebagai sarana restriksi pasar semakin dibatasi. Ketentuan-ketentuan teknis yang menyangkut sanitari dan fitosanitari (karantina pertanian dan kesehatan pangan) menjadi sangat penting dalam perdagangan internasional khususnya perdagangan komoditas pertanian.

Karantina Pertanian berperan dalam membantu para pelaku agribisnis dalam upaya meningkatkan daya saing komoditas produk pertanian di pasar internasional melalui sertifikasi kesehatan komoditas produk pertanian yang akan diekspor agar bisa diterima dan memenuhi persyaratan teknis (*Sanitary and Phytosanitary Measures*) di negara tujuan, melindungi sumber daya alam hayati nabati dan hewani dari ancaman OPTK / HPHK, serta pengendalian produk-produk komoditas impor yang tidak memenuhi syarat dan standar kesehatan manusia, hewan dan lingkungan hidup.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang, berupaya ikut serta dalam melindungi sumber alam di daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan sebagai pilar pembangunan ekonomi wilayah, oleh karena itu untuk upaya pencegahan masuk dan tersebarnya

OPTK/HPHK yang dapat menghancurkan sumber daya alam yang ada. Fungsi Karantina secara langsung sangat berperan dalam mendukung perekonomian daerah yang salah satunya menuju eksalerasi ekspor.

➤ **Geografis**

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan perkarantinaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, otonomisasi daerah dan atas kebijakan pembangunan system dan usaha agribisnis yang mampu mendorong dan meningkatkan daya saing produk agribisnis di pasar global, sehingga Karantina Pertanian terus berbenah diri dengan cara meningkatkan segala kemampuan demi terpenuhinya produk yang berkualitas. Berkaitan dengan itu, pihak karantina mencoba meningkatkan pelayanan operasionalnya yang selama ini masih belum berjalan sebagai mana mestinya, sebagaimana isu aktual yang mengemuka pada saat ini adalah “ **Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang belum optimal** “.

Selanjutnya agar peran karantina pertanian dapat diakui masyarakat khususnya dan dunia internasional umumnya institusi karantina pertanian harus diperkuat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang. Upaya memperkuat institusi karantina pertanian telah dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian melalui revitalisasi berbagai aspek sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Restra Badan Karantina Pertanian 2015 - 2019 yaitu :

1. **Membangun Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Karantina**
2. **Karantina Sebagai Instrumen Perdagangan**
3. **Penataan Sumber Daya Manusia**
4. **Sarana dan Prasarana Karantina**

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang sebagai kepanjangan tangan Badan Karantina Pertanian di Provinsi Padang melaksanakan tugas pokok :

1. Mencegah masuknya OPTK / HPHK dari luar negeri dan mencegah tersebarnya dari area (daerah) tertular OPTK/HPHK ke area (daerah) bebas OPTK/HPHK didalam wilayah negara RI;
2. Mencegah keluarnya HPHK dari wilayah negara RI ke luar negeri ;
3. Mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tertentu dari wilayah negara RI keluar negeri apabila disyaratkan oleh negara tujuan ; dan
4. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan produk pertanian impor.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa OPTK tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan serta HPHK di Pelabuhan Muara, Bandara Internasional Minangkabau , Kantor Pos Padang, serta tempat-tempat pemasukan/pengeluaran lainnya di dalam wilayah kerja BKP Kelas I Padang ;
- b. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPTK tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan serta HPHK;
- c. Pelaksanaan pembuatan koleksi OPT/OPTK tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan serta HPH / HPHK;
- d. Pengelolaan laboratorium karantina tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan serta laboratorium karantina hewan
- e. Pengelolaan data, informasi serta dokumentasi kegiatan operasional perkarantinaaan tumbuhan dan hewan ;

- f. Pemberian pelayanan teknis kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan dan hewan ;
- g. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- i. Pengawasan keamanan hayati tumbuhan dan hewan serta produknya yang diimpor, diekspor dan diantar area kan.

3. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang sebagai institusi strategis didalam pertahanan negara dari ancaman OPTK / HPHK dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang menetapkan visinya dengan menjabarkan visi Badan Karantina Pertanian dalam mewujudkan Karantina Pertanian Yang Modern dan Terpercaya yaitu :

” Terwujudnya Pelayanan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Terbaik di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 ”

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang ini ditetapkan karena Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang sebagai institusi pemerintah yang langsung memberikan pelayanan kepada publik sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan jasa karantina tumbuhan dan hewan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya yang ***transparan , efektif dalam waktu, efisien dalam hasil , konsisten dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.***

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang mengemban misi ” **Melindungi pertanian Indonesia (khususnya provinsi Sumatera Barat) dari ancaman masuk dan tersebarnya OPTK dan HPHK ke wilayah RI (khususnya provinsi Sumatera Barat), mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian serta pengawasan keamanan hayati dan ketahanan pangan** ”

Penjabaran misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mencegah masuk dan tersebarnya OPTK dan HPHK dari luar negeri dan antar area dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (khususnya provinsi Sumatera Barat)
2. Mendukung keberhasilan program peningkatan ketahanan pangan regional/nasional dan pengembangan Agribisnis
3. Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran produk agribisnis (Menjamin kualitas komoditas ekspor di pasar dunia / *quality assurance*)
4. Melaksanakan pelayanan karantina pertanian yang prima (transparan dan akuntabel)
5. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Pertanian dan bebas KKN (*good governance and clean government*)
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian (*quarantine minded*)

BARANTAN

➤ **Data Frekuensi/Volume Lalulintas**

Pada TA. 2015 frekwensi kegiatan berjumlah 6.198 mengalami peningkatan sebesar 10,05% dibandingkan TA. 2014 sebesar 5.632 frekwensi. Penurunan terjadi untuk volume tonase sebesar 9,40 % TA. 2015 sebanyak 884.869.863,275 kg jika dibandingkan TA. 2015 adalah 283.209 batang dan TA. 2014 97.538 batang, sebesar 190,36 %. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa karantina tumbuhan TA. 2015 adalah Rp. 337.523.020,- mengalami penurunan sebesar 9,9% dibandingkan TA. 2014 Rp. 374.637.657,-

IV. PERMASALAHAN :

a. Operasional

- Pemahaman sebagian masyarakat tentang tugas dan fungsi Karantina Pertanian (TUSI) masih kurang, sehingga masih ditemukan pemasukan media pembawa (MP OPTK/HPHK) melalui Kantor Pos tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara asal.
- Perdagangan online atau transaksi melalui internet juga dilakukan terhadap Media Pembawa OPTK terutama benih dan bibit tanaman antar Negara dan sebagian dari pelaku usaha atau masyarakat belum memahami peraturan karantina untuk memasukan benih/bibit tanaman dari luar negeri (Impor) ke Wilayah Negara RI
- Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan beberapa provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi sehingga diperlukan peningkatan kerjasama dengan pihak terkait diantaranya dengan Kepolisian RI (POLRI) guna mencegah masuknya produk-produk ilegal terutama bawang merah yang masuk melalui pantai timur pulau sumatera dan dibawa ke Propinsi Sumatera Barat.

b. Non Operasional

- Berdasarkan beban tugas dan tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, maka diperlukan peningkatan keterampilan dan keahlian pegawai.

- Masih kurangnya kesadaran pegawai dalam mewujudkan kedisiplinan administrasi

V. ANALISA RESIKO STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, dan THREATS (SWOT)

➤ KEKUATAN (STRENGTHS) :

1. Memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan tumbuhan antara lain pejabat fungsional POPT (Ahli dan terampil) , Medik Veteriner , Paramedik Veteriner , Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum (staf teknis dan administrasi) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2. Memiliki sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perkarantinaan pertanian yang memadai
3. Tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan perkarantinaan pertanian yang memadai berupa DIPA yang pengusulannya melalui perencanaan dan kebutuhan UPT.
4. Status kelembagaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang sebagai Unit eselon III/a Badan Karantina Pertanian
5. Memiliki landasan hukum yang kuat untuk penyelenggaraan perkarantinaan pertanian
6. Memiliki berbagai peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis penyelenggaraan perkarantinaan pertanian
7. Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang merupakan salah satu unsur CIQ (*Custom, Imigration , Quarantine*) yang harus ada di pintu masuk dan keluar antar negara (khususnya di Provinsi Sumatera Barat)
8. Keanggotaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dalam POKJA Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

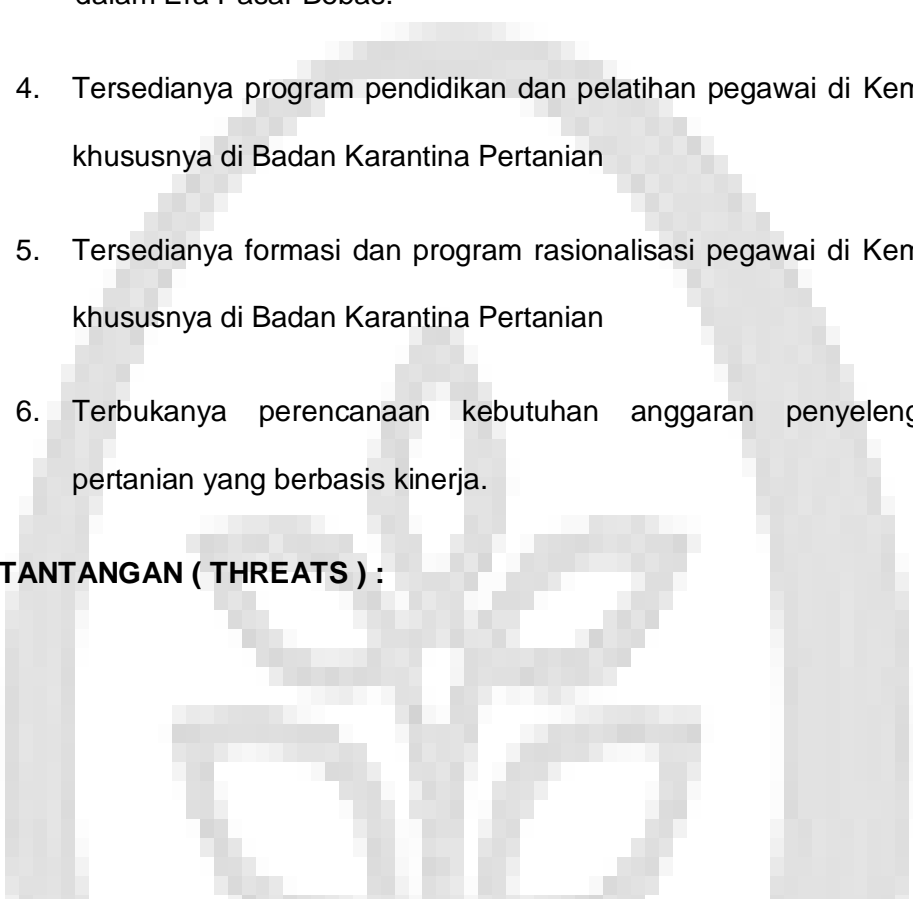
➤ KELEMAHAN (WEAKNESSES) :

1. Kuantitas dan kualitas SDM belum mencukupi standar minimum kebutuhan personil Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang
2. Sarana dan prasarana pendukung operasional belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan dan perkembangan teknologi
3. Pola karir dan pola mutasi belum berjalan sebagaimana mestinya
4. Belum semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan yang lebih operasional
5. Budaya kerja SDM belum memenuhi standar yang sebagaimana mestinya

➤ **PELUANG (OPPORTUNITIES) :**

1. Meningkatnya kerjasama antar instansi (nasional, regional dan Internasional) melalui forum koordinasi , komunikasi dan MOU
2. Peran Karantina Pertanian semakin penting dalam menentukan akses pasar komoditas pertanian dalam perdagangan internasional
3. Peran Karantina Pertanian juga sebagai Instrumen untuk menjaga komoditi Impor dalam Era Pasar Bebas.
4. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di Kementerian Pertanian khususnya di Badan Karantina Pertanian
5. Tersedianya formasi dan program rasionalisasi pegawai di Kementerian Pertanian khususnya di Badan Karantina Pertanian
6. Terbukanya perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan karantina pertanian yang berbasis kinerja.

➤ **TANTANGAN (THREATS) :**



Meningkatnya tuntutan publik/masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah dan terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*)

Tuntutan publik/masyarakat atas penyelenggaraan perkarantina yang sesuai dengan kemajuan teknologi, era globalisasi, otonomi daerah dan arah kebijakan pembangunan sistem dan usaha agribisnis

Diperlukan sistem penyelenggaraan perkarantina pertanian yang mampu mendorong dan meningkatkan daya saing produk agribisnis di pasar global

Meningkatnya tuntutan konsumen terhadap pangan yang berkualitas, aman, dan sehat untuk dikonsumsi

Meningkatnya tuntutan publik/masyarakat atas pelayanan prima dalam penyelenggaraan perkarantina pertanian

Masih rendahnya pemahaman publik/masyarakat tentang arti pentingnya karantina pertanian

VI. RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN 5 TAHUN

1. KELEMBAGAAN

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Karantina Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian terdiri atas seorang Kepala Balai (Eselon III/A), Ka.Sub.Bagian Tata Usaha (Eselon IV/A), Kepala Seksi Karantina Hewan (Eselon IV/A), Kepala Seksi Karantina Tumbuhan (Eselon IV/A), Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (Eselon IV/A) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang mempunyai wilayah kerja :

- Pelabuhan Laut Teluk Bayur
- Bandar Udara Internasional Minangkabau
- Kantor Pos Padang
- Pelabuhan Bungus
- Tempat pemasukkan dan pengeluaran lainnya di Provinsi Padang

2.SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang sampai akhir tahun 2015 sebanyak 54 orang PNS dan 11 orang tenaga keamanan dan kebersihan kantor yang berdasarkan kualifikasinya jabatan dan tugasnya adalah sebagai berikut :

- Pejabat Struktural 5 orang
 - Pejabat Fungsional :
 - ❖ Medik Veteriner : 4 Orang, 1 orang calon
 - ❖ Paramedik Veteriner : 6 Orang, 3 orang calon
 - ❖ POPT Ahli : 8 Orang, 1 orang calon
 - ❖ POPT Terampil : 6 Orang, 3 orang calon
 - ❖ PMHP Pertama : 1 Orang
 - ❖ PMHP P. Lanjutan : 1 Orang
 - ❖ Tenaga Administrasi : 15 Orang
 - ❖ Tenaga Keamanan : 11 orang

3. SARANA dan PRASARANA PENDUKUNG / INFRASTRUKTUR

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang sampai akhir tahun 2015 antara lain :

1. Gedung/Bangunan

- Gedung Kantor BKP Mata Air seluas 1385 M²
- Gedung Kantor Wilker BKP di BIM seluas 400 M²
- Gedung IKH Pasir Jambak seluas 2.400 M² .

- Laboratorium BIM seluas 432 M²
 - Screen House seluas 20 M²
 - Incenerator 12 M²
 - Gedung Anex Laboratorium seluas 36 M²
 - Dormitory di Blkg Lab BIM seluas seluas 75 M²
 - Rumah Dinas di Rawang Timur seluas 174 M²
 - Rumah Dinas di Pasir Jambak seluas 86 M²
 - Pos Penjagaan Ketaping seluas 18 M²
 - Ruang Pengaman Genset Pasir Jambak seluas 12 M²
 - Ruang Genset Wilker BIM seluas 12 M²
 - Ruang Genset blkg Lab BIM seluas 6 M²
 - Pos Penjagaan Pasir Jambak seluas 18 M²
 - Gudang tertutup di Blkg Lab BIM seluas 45 M²
 - Gudang peralatan di Pasir Jambak seluas 55 M²
 - Lab. IKH seluas 60 M²
 - Gudang Pakan di Pasir Jambak seluas 60 M²
2. Kendaraan Operasional/Dinas :
- 6 Kendaraan Operasional roda- 4
 - 26 Kendaraan Operasional roda-2

3. Peralatan Laboratorium :

- Mikroskop 17 unit
- Laminar Air Flow 2 unit
- Autoclave 5 unit
- Incubator 5 unit
- Oven 6 unit
- Centrifuge 2 unit
- Electric balance 1 unit
- Waterbath 2 unit

4. Peralatan Pengolah Data :

- Komputer 39 unit
- Laptop/Note Book 20 unit
- Scanner 1 unit
- UPS 21 unit
- Printer 41 unit

VII. Lampiran Matriks Rencana Kerja 5 Tahun (Tahun 2015 – 2019)

NO	3 Pilar Karantina Pertanian	TAHUN				
		I	II	III	IV	V
1	Penguatan Kelembagaan					

2	Penguatan SDM					
3	Pengembangan Infrastruktur/Sarana/ Prasarana					

